

DASAR-DASAR KURIKULUM BERBASIS MULTIKULTURAL (Filsafat Kurikulum yang Mengitarinya)

Zainal Arifin, M.Pd.I

Dosen PAI STAI Miftahul Ula Nganjuk; Ketua LP Maarif Cab. Kab. Nganjuk

Zainalarifin061169@gmail.com

Abstrak

Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi tolok ukur dan rancangan keberhasilan pendidikan. Pendidikan yang baik ditandai dengan perumusan serta pengimplementasian kurikulum yang baik pula. Karena itu, agar dapat berdiri tegak kuat dan tidak roboh serta dapat tercapai tujuan pendidikan, kurikulum haruslah didasari dengan dasar filsafat yang kuat. Melalui metode kepustakaan (library research), penulis akan mengupas dasar kurikulum mengenai filsafat yang berada di dalamnya melalui sudut pandang multikulturalisme. Hasil dari kajian ini adalah penerapan multikulturalisme dalam pendidikan sehingga menjadi “pendidikan multikultural” sangatlah tepat mengingat Indonesia adalah negara multikultur terbesar di dunia. Terlepas dari pro kontra pendidikan multikultural, sebelum menerapkan konsep pendidikan multikultural, tentunya terlebih dahulu kita formulasikan kurikulum yang berbasis multikultural dengan filsafat multikulturalisme sebagai roh kurikulum tersebut.

Kata Kunci: Multikultura, kurikulum, filsafat

A. Pendahuluan

Dalam kajian yang berjudul “dasar-dasar kurikulum berbasis multikultural” dengan anak judul filsafat kurikulum yang mengitarinya, kami sebagai penulis akan memulai bahasan kajian ini dengan bahasa pembahasan filsafat multikulturalisme. Dalam pembahasan yang pertama ini, kami akan menoba mengambil pemikiran Tilaar bahwa multikulturalisme lahir karena terpengaruh oleh teori keadilan John Rawls dan teori kebebasan Charles Taylor, sehingga akan dipaparkan kedua pemikiran tokoh tersebut, serta bagaimana proses kedua teori John Rawls dan Charles Taylor bertransformasi menjadi sebuah ideologi multikulturalisme.

Selanjutnya akan dibahas pula beberapa aliran filsafat pendidikan yang telah biasa kita kenal. Selain itu, penulis membagi filsafat pendidikan menjadi dua aliran pemikiran filsafat yaitu tradisional dan kontemporer. Dari kedua aliran itu akan

muncul beberapa aliran filsafat ayang yang mana pada kajian kali ini, aliran tradisional akan dibatasi oleh aliran perenialism dan essentialism, sedangkan dalam aliran modern akan membahas aliran progressivism dan recontructionism serta eksistialism.

Dan pada bagian yang terakhir, penulis akan coba memberikan sebuah tawaran pemikiran tentang filsafat yang mendasari kurikulum berbasis multikultural. Akan tetapi, kami coba menggunakan sudut pandang multikultural yang terdapat dalam kurikulum 2013 dewasa ini. Sehingga dalam asumsi penulis bahwa dalam hal ini, kurikulum dapat dikatakan multikultural bila terdapat nilai-nilai multikultural di dalamnya.

B. Filsafat Multikulturalisme

Multikulturalisme sebagai filsafat terkadang ditafsirkan sebagai ideology yang menghendaki persatuan antara beberapa kelompok kebudayaan dengan hak dan status politik yang sama. Ideology multikulturalisme terkadang juga digambarkan sebagai upaya untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat di suatu Negara¹. Filsafat multikulturalisme - meminjam thesis yang di kemukakan oleh HAR Tilaar-tidak terlepas dari dua pemikiran filsul John Rawls dan Charles Taylor. Untuk itu akan dibahas pemikiran dari keduanya pada pembahasan setelah ini.

1. Multikulturalisme John Rawls

John Raws dalam *A. Theory of Justice* mengemukakan teori yang berupaya menghidupkan ide *Social contract* dan melanjutnya pemikiran Emanuel Kahn serta mengemukakan suatu pemikiran alternatid dari utilitarianisme. Menurut Raws, suatu masyarakat yang adil tidak hanya *the greatest good for the gratest number*, melainkan juga menekankan arti dari *self interest*.²

¹ Moh. Suardi, *Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublishing, 2015, Hlm. 182

² HAR Tilaar, *Multikulturalisme, Tantanagan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformsi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004,Hlm 75

John Rawls mengemukakan konsep keadilannya sebagai satu konsep yang netral kultur. Menurut Rawls, untuk mewujudkan satu masyarakat yang teratur, maka prinsip-prinsip keadilan yang dilaksanakan harus bersifat fair. Prinsip keadilan tersebut harus menguntungkan setiap orang dan berdasarkan kesepakatan dari semua orang. Untuk itu, Rawls mengandaikan satu posisi asli, ditandai dengan kebebasan, kesamaan dan rasionalitas orang-orang yang ada di dalamnya diselubungi oleh satu ketidaktahuan terhadap hal-hal spesifik, kecuali hak-hak yang bersifat umum. Dengan demikian mereka dapat berpikir secara objektif, berpikir untuk keuntungan semua orang, untuk kebebasan dan kesamaan di antara semua pihak dalam masyarakat. Dengan prinsip egalitariannya, Rawls sangat menginginkan kesamaan di antara individu-individu, namun ia tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksamaan-ketidaksamaan. Untuk itu ia menyikapinya dengan strategi maksimum, di mana ketidaksamaan terutama harus menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung, tanpa merugikan pihak yang sudah beruntung dan semua posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang.³

Dalam keadaan demikian, Rawls mengemukakan teorinya yang menghidupkan kembali social kontrak dan pendekatan etika sepanjang abad ke dua puluh. dalam posisi yang asli tersebut, Rawls mengemukakan dua prinsip yaitu:

- a. Setiap manusia harus mempunyai sejumlah maksimum kebebasan individual dibandingkan dengan orang lain. Keadaan seperti itu diperlukan untuk bersama-sama menikmati kemerdekaan yang juga dipunyai orang lain.
- b. Setiap ketidaksamaan social ekonomi haruslah memberikan kemungjinann keuntungan bagi yang tidak memproleh keuntungan. Keadaan ini diambil dari pekerjaan dan posisi seseorang yang mempunyai akses serta kesemnpatan untuk itu.⁴

Setiap individu mempunyai dasar yang tak dapat dilanggar mengenai keadilan, bahkan kemakmuran suatu masyarakat tidak dapat melanggar hak

³ Ridha Ahida, *Konsep Keadilan pada Masyarakat Multikultural dilihat dari Perspektif John Rawls dan Will Kymlicka*, dalam Perpustakaan Digital Universitas Indonesia, Hlm. 1

⁴ HAR. Tilaar, *Op. Cit*, Hlm. 76

tersebut. Oleh karena itu, suatu masyarakat yang berkeadilan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat tawar menawar politik maupun perhormatan kepentingan social.

Manusia itu berada dibelakang cadar ketidaktahuannya, menentukan haknya dan kewajibannya. Liberalisme merupakan suatu doktrin politik, social, ekonomi yang menekankan kepada kemerdekaan individu, keterbatasan peran pemerintah, perkembangan social secara bertahap serta perdagangan.⁵

Penulis sangat mengapresiasi perspektif Rawls tentang ketidaksetaraan-ketidaksetaraan antara kelompok-kelompok kultural yang mana ketidaksetaraan tersebut harus disikapi dengan melakukan redistribusi nilai-nilai social yang terutama menguntungkan kelompok-kelompok kultural yang telah tidak diuntungkan sebelumnya, tanpa merugikan kelompok kultural yang telah beruntung. Konsep keadilan Rawls sangat relevan untuk diterapkan pada ketidaksetaraan-ketidaksetaraan di bidang social dan ekonomi yang disebabkan oleh keanggotaan kultural. Dengan demikian, multikultural mengandung nilai keadilan yang menjadi nilai utama dalam menyikapi perbedaan yang ada.

2. Multikulturalisme Charles Taylor

Menurut Abbey filsafat Taylor lebih tepat disebut sebagai ontologi moral, yakni moral yang memiliki dimensi hakikinya sendiri, lepas dari pikiran manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia hendak melampaui paradigma yang berpusat pada manusia di dalam teori-teori tentang moralitas, dan kemudian memberi ruang bagi sumber-sumber tindakan moral yang berada di luar, atau melampaui, diri manusia. Dalam hal ini Taylor banyak mengikuti filsafat moral Iris Murdoch. Bagi Murdoch sendiri moral adalah tarikan dari Yang Baik itu sendiri, yang sifatnya lebih tinggi dari motivasi manusia biasa.

Charles Taylor yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan kultural kita bukan hanya bersifat pribadi atau subyektif, melainkan dibentuk secara social.

⁵ *Ibid*, Hlm. 76

“Tindakan-tindakan kultural kita bersifat “intersubjektif”, artinya kita tidak pernah bertindak sendirian. Makna tindakan kita adalah suatu makna yang dihayati bersama oleh orang lain; makna ini didasarkan pada asumsi-asumsi dan tindakan-tindakan kultural kita. Asumsi-asumsi yang berlainan mengenai bagaimana kebenaran harus dinyatakan oleh seorang yang memiliki kebajikan di dalam kehidupan bersama”.

Dalam bukunya yang berjudul *Multiculturalism and ‘The Politics of Recognition’* (1990) Charles Taylor memperluas pemikiran politik multikulturalisme dengan memperjelas multikulturalisme itu sebagai bentuk dorongan kepentingan politik kaum minoritas atau kelompok-kelompok *subaltern* atau kelompok kelas kedua (hak untuk menentukan diri sebagai minoritas/kelompok yang terpinggirkan. Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya arus globalisasi dan abad informasi yang cenderung menghilangkan batas-batas (*borderless*) geografi dan budaya juga berperan penting mempercepat adanya budaya multikulturalisme.⁶

Charles Tylor mengemukakan pendapatnya bahwa kita harus menyadari bahwa persamaan hak dibawah hukum juga harus disertai dengan kemampuan kita untuk memahami bahwa kita sendiri adalah penulis dari hukum itu yang mengikat kita. Hal ini berarti bahwa dengan jelas menunjukkan sistem yang mengikat kita tidak menghapuskan kondisi social yang berbeda beda juga terhadap peredaan budaya. Dapat terjadi berbagai jenis konflik yang berasal dari diskursus tentang perbedaan-perbedaan tersebut serta resolusi secara demokratis atas perentangan tersebut⁷

Dengan demikian demokrasi konstitusional Charles Taylor menurut hemat penulis memberikan kepada anggota-anggotanya yang berkebudayaan minoritas, hak yang sama duduk bersama dengan kebuidayaan mayoritas. Sebagai contoh

⁶ Yusuf Akhyar. *Multikulturalisme dalam Perspektif Filsafat*. Kajian dalam seminar “Student Circle” Pusat Studi Islam Paramadina dan Islamic College for Advance Studies (ICAS) Jakarta, 12 Maret 200

⁷⁷ HAR. Tilaar. *Op. Cit*, Hlm. 78

yang tidak dapat menerapkan atau gagal dalam hal tersebut yakni masih ditemukannya kelompok seperti Afican Amerika dan Asia Amereica.

Pendapat Charles Taylor ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan mendapat tanggapan yang luas dari kalangan akademikus seluruh dunia, termasuk Jiirgen Habermas dari Universitas Frankfurt. Habermas mengatakan bahwa perlindungan yang sama di bawah hukum saja belum cukup dalam suatu demokrasi konstitusional. Kita harus menyadari bahwa persamaan hak di bawah hukum juga harus disertai dengan kemampuan untuk mengerti bahwa kita sendiri adalah penulis (*authors*) dari hukum-hukum tersebut yang mengikat kita. Hal ini berarti bahwa dengan jelas menunjukkan sistem yang mengikat kita tidak menghapuskan kondisi sosial yang berbeda-beda juga terhadap perbedaan budaya. Dapat terjadi berbagai jenis konflik yang berasal dari diskursus tentang perbedaan-perbedaan tersebut serta resolusi secara demokratis atas pertentangan-pertentangan tersebut. Habermas menganjur-kan agar supaya para warga negara dipersatukan oleh "*mutual respect*" terhadap hak-hak orang lain.⁸

Ketika pokok pikiran Charles Taylor dikemukakan, pada saat itu lembaga- lembaga publik, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, sekolah-sekolah, universitas di bawah sorotan yang tajam karena gagal untuk menghargai identitas budaya yang khusus dari warga negaranya. Di Amerika Serikat hal ini dengan nyata kelihatan terhadap kelompok-kelompok *African-American*, *Asian-American*, *Native American*, dan pandangan terhadap wanita. Di dalam kehidupan politik dewasa ini muncul keinginan untuk diakui (*recognition*) terhadap hak hidup kelompok dalam masyarakat dengan kebudayaannya yang khas. Kebutuhan ini merupakan pendorong yang sangat kuat di belakang gerakan nasionalisme dalam politik. Gerakan ini menampakkan diri di dalam kehidupan politik, seperti tuntutan-tuntutan kelompok- kelompok minoritas, kelompok-kelompok *subaltern*, kelompok feminisme dan kelompok politik mutikulturalisme.⁹

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid t*, Hlm, 79

C. Dasar filsafat dalam Kurikulum

Proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa. Melalui pendidikan berbagai nilai dan keunggulan budaya di masa lampau diperkenalkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi budaya dirinya, masyarakat, dan bangsa yang sesuai dengan zaman dimana peserta didik tersebut hidup dan mengembangkan diri. Kemampuan menjadi pewaris dan pengembang budaya tersebut akan dimiliki peserta didik apabila pengetahuan, kemampuan intelektual, sikap dan kebiasaan, keterampilan sosial memberikan dasar untuk secara aktif mengembangkan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, warganegara, dan anggota umat manusia. Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Oleh karena itu, tujuan pendidikan yang mereka pelajari tidak semata berupa prestasi besar bangsa di masa lalu tetapi juga hal-hal yang berkembang pada saat ini dan akan berkelanjutan ke masa mendatang.

Kurikulum merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dikembangkan dari pedoman kurikulum yang telah ditentukan. Pedoman ini akan digunakan sebagai penentu jalannya pencapaian tujuan pendidikan. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pedoman yaitu filsafat. Pada dasarnya ada beberapa filsafat yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan kurikulum pendidikan. Tetapi dari beberapa filsafat, menunjukkan ketidak seragaman pemikiran tentang aspek yang terdapat dalam dunia pendidikan. Dalam artian, filsafat yang dianut akan mempengaruhi pandangan seseorang, terutama kurikulum yang dianut dalam suatu lembaga.

Demikian mendasarnya kedudukan filsafat, paling tidak filsafat memiliki empat fungsi dalam kurikulum:

1. Filsafat dapat menentukan arah dan tujuan kurikulum.
2. Filsafat dapat menentukan isi dan materi pelajaran kurikulum
3. Filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan

4. Filsafat dapat menentukan tolok ukur keberhasilan proses pendidikan.¹⁰

Dalam kaca mata filsafat pendidikan dipengaruhi oleh berbagai aliran atau mazhab pendidikan yang telah dikenalkan dan dikembangkan oleh para ahli, yang mana aliran pemikiran filsafat dibedakan menjadi tradisional dan kontemporer. Dari kedua aliran itu akan muncul beberapa aliran filsafat yang mana pada kajian kali ini, aliran tradisional akan dibatasi oleh aliran perenialism dan essentialism, sedangkan dalam aliran modern akan membahas aliran progressivism dan recontructionism serta eksistialism.

1. Perenialism

Menurut aliran ini, pendidikan sebagai proses mengembalikan keadaan sekarang. Perenialism berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang.¹¹ Aliran Dari pendapat ini diketahui bahwa perenialism merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan lurus. Karena itulah, perenialism berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Kebenaran menurut aliran ini terletak pada wahyu Tuhan dan caramenumbuhkan kebenaran tersebut terletak pada tugas guru.¹²

Perealism menghendaki agar pendidikan kembali pada jiwa yang mneguasai abad pertengahan, karena ia merupakan jiwa yang menuntun manusia hingga dapat dimengerti adanya tata kehidupan yang telah ditentukan secara rasional¹³. Aliran ini berpendapat bahwa Tugas utama pendidiakn adalah mempersiapkan anak didik kea rah kematangan. Matang dalam arti hiodup akalinya. Jadi, akal inilah yang perlu mendapat tuntunan kea rah kematangan tersebut. Sekolah

¹⁰ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015, Hlm. 35

¹¹ Muhammad Noor Syam, 1986 Hlm. 154

¹² Made pidarta, *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: Riena Cipta , 2013, Hlm. 91

¹³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 80

rendah memberikan pendidikan dan pengetahuan serba dasar. Dengan pengetahuan yang tradisional seperti membaca, menulis, dan berhitung, anak didik memperoleh dasar penting bagi pengetahuan-pengetahuan yang lain.

Dengan demikian, jika aliran ini menjadi dasar dalam suatu kurikulum, para pendidik bertugas membimbing peserta didik menggunakan akalunya dalam kehidupan, dengan kata lain akal merupakan sesuatu yang essential. Bagi aliran filsafat perelialism, karakter manusia secara umum adalah konsisten atau dengan kata lain tidak mengalami perubahan dan akan tetap sama sepanjang zaman. Oleh karena itu pendidikan yang diberikan kepada peserta didik haruslah sama. Dengan demikian, kurikulum yang memuat sejumlah mata pelajaran dapat disampaikan kepada semua peserta didik sepanjang waktu dan zaman.¹⁴

Hemat penulis titik tekan kurikulum yang menganut aliran ini terletak pada mata pelajaran, bukan pada peserta didik. Secara otomatis, guru akan menjadi sentral saat kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk itu guru harus menempatkan komponen buku ajar, media, strategi dan lingkungan pembelajaran dan menguji secara seksaa relevansi kesemuaannya itu.

2. Esensialism

Aliran esensialism merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialism muncul pada zaman Renaissance dengan cirri-cirinya yang berbeda dengan progresivisme. Dasar pijakan aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialism memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai

¹⁴ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Pesantren, Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Islam Modern Assalam Surakarta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, Hlm. 49

terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Tugas pendidika adalah pembawa nilai-nilai yang ada diluar ke dalam jiwa peserta didik¹⁵

Sekolah, sebagai tempat utama dalam pendidikan, didesain sedemikian rupa dengan pelajaran yang terstruktur agar mempercepat kebiasaan berfikir efektif. Sedangkan tugas utama guru adalah memberikan pendidikan dan pengajaran (pengetahuan) kepada anak didik. Dengan kata lain, keberhasilan anak dalam bidang akalnya sangat tergantung kepada guru, dalam arti pengajaran berpusat pada guru.¹⁶ Penganut aliran ini berpendapat bahwa belajar adalah menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai social angkatan baru yang timbul untuk ditambah, dikurangi dan diteruskan pada angkatan berikutnya

Apabila filsafat ini dijadikan landasan kurikulum, maka sekolah mempunyai misi untuk mengajarkan *basic knowledge* kepada para peserta didik dan dari sini, kurikulum di sekolah dasar harus memuat dasar-dasar ilmu yang membuat peserta didik dapat membaca dan menguasai aritmatika. Sedangkan di sekolah menengah, kurikulum bertujuan mengembangkan kompetensi tentang sejarah, sains, matematika dan bahasa.¹⁷

Menurut penulis, aliran ini kurang dapat mengeluarkan seluruh potensi peserta didik. Hal ini dikarenakan guru sebagai pusat dalam proses pembelajaran yang tidak jauh berbeda dengan perelialism. Dan juga peserta didik juga harus menerima mata pelajaran yang telah ditentukan oleh gueu tanpa bisa memilih mata pelajaran yang disukainya karena guru adalah fihak yang paling mengetahui apa yang harus diajarkan kepada peserta didik.

3. Progressivism

Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam sebuah realita kehidupan, agar manusia bias *survive* menghadapi semua tantangan hidup. Aliran progresivism telah memberikan

¹⁵ Muhaimain, *Op. Cit*, Hlm. 80

¹⁶ Made pidarta, *Op. Cit*, Hlm. 91

¹⁷ Abdullah Aly, *Op. Cit*, Hlm. 50

sumbangan yang besar di dunia pendidikan saat ini. Aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Anak didik diberikan kebaikan baik secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain¹⁸. Oleh karena itu, filsafat progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang otoriter.

Progressivism mempunyai jiwa perubahan, relativitas, kebebasan, dinamika dan perbutan nyata. Tidak ada kebutuhan yang pasti dan tidak ada pula kebenaran yang pasti. Semua itu bersifat relatif dan tujuannya pun tidak pasti. Maka alat untuk mencapai tujuan bisa berubah seiring berubahnya tujuan. Dan oleh karena itu tujuan pendidikan adalah kontruksi pengalaman yang terus menerus agar peserta didik dapat berbuat sesuatu yang intelligent dan mampu mengandalkan adaptasi terhadap tuntutan lingkungan.¹⁹

Aliran ini berpendapat bahwa sekolah yang ideal adalah sekolah yang isi pendidikannya berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Karena sekolah adalah bagian dari masyarakat. Dan untuk itu, sekolah harus dapat mengupayakan pelestarian karakteristik atau kekhasan lingkungan sekolah sekitar atau masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, maka pendidikan berupaya memberikan kehidupan sosial yang lebih baik serta agen pembaruan masyarakat.²⁰

Kurikulum yang menganut dasar filsafat progresif dikembangkan berdasarkan minat dan inisiatif peserta didik. Dan titik tekan dari kurikulum yang menganut aliran ini adalah peserta didik dan peserta didik harus aktif dalam proses pendidikan serta harus dinamis dan tidak menunggu informasi dan pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Guru di sini dipandang sebagai *guide*

¹⁸ Ali, 1990: 146)

¹⁹ Muhaimin, *Op. Cit.* Hlm. 80

²⁰ Made Pidarta, *Op. Cit.* Hlm. 93

dan *advisor*. Dengan demikian, aktivitas di kelas harus fokus kepada pemecahan masalah dan atmosfer sekolah harus kooperatif dan demokratis.²¹

Bagi aliran filsafat *progressivism*, kurikulum haruslah terbuka dalam artian mata pelajaran yang dipelajari peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari peserta didik. Dan di sini, kurikulum dewasa ini telah memberikan hak kepada peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran yang dirasa cocok untuknya melalui kelompok mata pelajaran peminatan. Tetapi sayangnya ini hanya berlaku pada kurikulum yang ada pada sekolah menengah atas.

4. Rekonstruksionisme

Kata Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris *reconstruct*, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepeham dengan aliran perenialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Menurut Muhammad Noor Syam, kedua aliran tersebut memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran.²²

Aliran ini merupakan lanjutan dari filsafat *progressivism* yang menginginkan kondisi manusia untuk diperbaiki. Aliran ini bercita-cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total di semua bidang kehidupan melalui lembaga dan proses pendidikan²³. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia.

²¹ Abdullah Aly, *Op. Cit*, Hlm. 48

²² (1985: 340)

²³ Made Pidarta. *Loc. Cit*, Hlm. 93

Di samping itu, aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur dan diperintah oleh rakyat secara demokratis, bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Cita-cita demokrasi yang sesungguhnya tidak hanya teori, tetapi mesti diwujudkan menjadi kenyataan, sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran serta keamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit,, keturunan, nasionalisme, agama (kepercayaan) dan masyarakat bersangkutan.

Dan bila aliran filsafat ini masuk pada dasar pengembangan kurikulum, maka sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus menjadi agen utama dalam merekonstruksi kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu kurikulum haruslah memuat mata pelajaran yang dapat menggugah kesadaran peserta didik dalam permasalahan sosial. Untuk itu, mata pelajaran agama, ekonomi, politik dan pendidikan dirasa cocok untuk kurikulum ini. Dan problem solving juga dirasa cocok untuk metode ²⁴

5. Konstruktivism

Filsafat konstruktivism adalah salah satu filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi kita sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari kenyataan (realitas).²⁵ Jean Piaget psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme, teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Konstruktivisme menekankan perkembangan dan konsep dan pengertian yang lebih mendalam, pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat siswa. Jika seseorang tidak aktif membangun pengetahuannya, meskipun usianya tua tetap tidak akan berkembang pengetahuannya.

Dengan demikian, pengetahuan adalah konstruksi dari pengalaman yang dialami oleh manusia. pengetahuan tidak bisa begitu saja dipindahkan dari otak seorang satu kepada yang lainnya. Siswalah yang mengartikan tentang apa yang

²⁴ Abdullah Aly, *Op. Cit*, Hlm. 51

²⁵ Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual, Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Refika Aditama, 2013, Hlm. 15

telah diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalaman mereka sendiri.²⁶

Menurut Zahorik, terdapat lima elemen belajar yang konstruktivistik yang mana pertama adalah pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Lalu yang kedua memperoleh pengetahuan baru kemudian memperhatikan detailnya. Selanjutnya yang ketiga pemahaman pengetahuan dengan menyusun konsep sementara. Setelah itu mempraktikkan pengetahuan dan pengetahuan tersebut dan yang terakhir merefleksikan strategi pengembangan pengetahuan itu.²⁷

Penulis lebih tertarik kepada aliran filsafat ini karena nilai lebih dari filsafat ini adalah kekuatan dalam membangun kebebasan serta persepsi yang positif terhadap belajar. Atau dengan kata lain, pembelajaran Konstruktivistik tidak *teacher centered* atau *student centered*, tetapi memposisikan keduanya setara dalam proses pembelajaran sehingga dalam hal ini metode pembelajaran yang sesuai agaknya adalah pembelajaran ilmiah. Yang mana metode pembelajaran ilmiah menjadi senjata dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013. Sehingga filsafat ini menurut hemat penulis selauai menjadi dasar pengembangan kurikulum 2013 yang akan di jelaskan pada sub bab yang akan datang.

6. Eksesentialism

Filsafat pendidikan eksesentialism berpendapat bahwa kenyataan dan kebenaran adalah eksistensi individu iu sendiri. Oleh karena itu, aliran filsafat ini menghendaki pendidikan selalu melibatkan peserta didik dalam mencari pilihan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan menemukan jati diri, karena setiap individu adalah unik dan memiliki tanggung jawab atas dirinya dan nasibnya sendiri.²⁸

Seseorang akan menjadi tahu tentang sesuatu melalui pengalaman. Dal ini bergantung kepada tingkat kesadaran masing-masing untuk mencar pengalaman.

²⁶ A. Lorsbach dan K. Tolbin, *Constructivism as a Referent for Science Teaching*, NARS *Reseach Matters to the Science Teacher*. No. 30, 1992, Hlm. 67

²⁷ John. A Zahorik, *Contructivist Teaching*, Bloomngton Indianan: Phil Delta Kappa Educationnal Foundation, 1995, Hlm. 14-22

²⁸ Muhaimin, *Op. Cit.* Hlm. 80

Kebenaran adalah relatif bergantung kepada keputusan setiap individu. Begitu pula nilai-nilai juga ditentukan oleh individu. Orang tidak perlu beradaptasi kepada nilai sosial agar eksistensi dirinya tidak hilang.

Pendidikan dalam pandangan aliran ini bertujuan mengembangkan kesadaran individu, memberikan kesempatan untuk bebas memilih etika, mendorong pengembangan pengetahuan diri sendiri, bertanggung jawab sendiri dan mengembangkan komitmen diri. Materi pelajaran harus memberikan kesempatan aktif sendiri dan peserta didik mendapatkan pengalaman sesuai dengan perbedaan-perbedaan individual mereka. Guru haruslah bersifat demokratis dengan teknik mengajar tidak langsung.²⁹

Kurikulum yang menganut filsafat ini menempatkan guru sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam menemukan jati dirinya yang unik. Dalam hal ini guru memperlakukan setiap individu peserta didik dan menghargai aspek emosional dan rasional masing-masing peserta didik agar mereka mampu menghargai diri mereka secara tepat. Karena itu, metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter kurikulum ini haruslah metode pembelajaran yang bersifat individual. Mata pelajarnya pun harus terbuka dengan minat serta bakat masing-masing peserta didik.³⁰

Filsafat ini kurang begitu pas diterapkan di negara yang berkembang yang mana pendidikan di negara berkembang pada umumnya belum mampu mengakomodir semua minat dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, karena faktor sarana dan prasarana yang masih minim serta *human Resorce* guru yang belum bisa menjadi fasilitator bagi keunikan individu peserta didik menjadikan hambatan kurikulum yang menganut aliran ini.

D. Dasar Filosofis Kurikulum 2013 berbasis Multikultural

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan [Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan](#) yang telah berlaku selama

²⁹ Made Pidarta, *Op. Cit.*, Hlm. 94

³⁰ Abdulah Aly, *Op. Cit.*, Hlm. 48

kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Di tahun 2014, Kurikulum 2013 sudah diterapkan di Kelas I, II, IV, dan V sedangkan untuk SMP Kelas VII dan VIII dan SMA Kelas X dan XI. Diharapkan, pada tahun 2015 telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam Kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan

Menurut penulis pribadi, aliran yang tepat untuk menjelaskan Kurikulum 2013 adalah aliran konstruktivisme. Karena Kurikulum 2013 dan aliran filsafat konstruktivisme mempunyai kesamaan dalam menekankan perkembangan dan konsep dan pengertian yang lebih mendalam, pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat siswa. Jika seseorang tidak aktif membangun pengetahuannya, meskipun usianya tua tetap tidak akan berkembang pengetahuannya. Penerapan pendidikan dengan pola konstruktivisme diwujudkan dengan mengajak siswa secara aktif membangun konsep-konsep kognitif. Guru tidak sekedar memberi, namun siswa mencari secara aktif, dan mengembangkannya.

Pembelajaran konstruktivisme melibatkan guru yang konstruktif pula. . Satu contoh misalnya dalam pembelajaran sains, siswa terlebih dahulu diajak untuk mengamati fenomena-fenomena alam yang ada seperti pelangi, banjir, merebaknya hama tanaman tertentu. Melalui fenomena yang ada, guru mengarahkan siswa untuk mencari penyebabnya. Siswa menemukan sendiri penyebab terjadinya pelangi, banjir ataukah hama Guru tidak hanya memberi pengetahuan kepada siswa, tetapi guru membantu siswa membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya, dengan memberikan kesempatan siswa untuk menentukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri. Guru memberikan kepada siswa anak tangga untuk membawa siswa kepada pemahaman yang lebih tinggi dan siswa harus memanjat sendiri anak tangga tersebut.

Proses belajar berdasarkan konstruktivisme, meliputi: (1) belajar tidak hanya sekedar menghafal, akan tetapi siswa harus mengonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri; (2) siswa belajar dari mengalami, di mana siswa mencatat sendiri

pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, bukan diberi begitu saja oleh guru; (3) pengetahuan yang dimiliki seseorang terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan (*subject matter*) (4) pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan; (5) manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru; (6) siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide; (7) proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang.³¹

Selain pandangan pribadi penulis, dalam konteks ke-Indonesia-an, para perancang Kurikulum 2013 menggunakan filsafat pancasila sebagai dasar pengembangan kurikulum. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Didiknas No. 20 Tahun 2003 bab II pasal 2 yang menyebutkan “Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”³²

Pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dengan memasukkan kedalam kurikulum melalui dasar filsafatnya tidak langsung dan menjamin efektifitas serta efisiensi pekerjaan itu. sebab para pelaku pendidikan di indonesia secara jelas tidak tahu bagaimana memasukkannya, bagian mana yang dimasukkan dan kapan dimasukkan. Untuk itu, rincian tentang pasal 2 dilanjutkan oleh peraturan pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mana para perancang kurikulum memperhatikan 5 kelompok mata pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik. Kelima kelompok mata pelajaran tersebut meliputi (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan

³¹ Dikjen Dikdasmen Depdiknas RI, *Pendekatan Kontektual, Kontektual Teaching and Learning (CTL)*, Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2003, Hlm. 3

³² *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional dan Penjasarannya*, Yogyakarta: Media Wacana, 2003, Hlm. 12

dan teknologi, (4) Kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.³³

Penggunaan filsafat Pancasila menjadi Dasar pengembangan kurikulum memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan tidak melupak akar budaya siswa itu berasal. Selain itu, dapat menumbuhkan nilai nasionalis dalam mengemangkan nilai-nilai budaya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

Selain kedua filsafat diatas, Kurikulum 2013 juga dapat dikembangkan dengan dasar filsafat yang telah penulis uraikan pada sub bab terdahulu. Jika ditinjau dari macam aliran filsafat pembentuk utama kurikulum dan landasan filosofis Kurikulum 2013 diatas, maka akan terlihat bahwa kurikulum 2013 mencoba mengabungkan/mengeklektikan semua aliran filsafat yang ada. Hal itu dilakukan mengingat makin peliknya persoalan bangsa dan Negara Indonesia dewasa ini. Melalui pengabungan itu diharapkan menjawab dan mengakomodir semua tantangan dan kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Dan dalam pengembangannya, bila kurikulum 2013 dibenturkan dengan aliran filsafat multikulturalisme, tentunya akan lahir sebuah kurikulum 2013 berbasis multikulturalisme. Dalam proses ini, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai multikultural masuk dan mewarnai serta mendasari pengembangan kurikulum 2013. Sebagaimana pembahasan pertama kita, bahwa filsafat multikulturalisme lahir karena teori keadilan serta teori kebebasan, maka nilai keadilan dan kebebasan tentunya menjadi dominan dalam pengembangan kurikulum 2013 berbasis multikultural. Sehingga dasar kurikulum 2013 haruslah mengemas nilai keadilan dan kebebasan.

Karena pendidikan multikultural adalah pendidikan yang dapat dirasakan oleh beberapa kultur yang berbeda sehingga kedua nilai ini wajib mutlak adanya. Pendidikan multikultural hakaketnya juga merupakan upaya melembagakan filsafat multikulturalismeya dalam sistem pendidikan dengan membumikan prinsip persamaan, saling menghargai, menerima dan memahami serta adanya komitmen

³³ *Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Hlm. 6*

³⁴ Djunaidi Ghoni, *Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural dalam Kajian ayng tidak dipublikasikan, Hlm. 4*

moral terhadap keadilan social, sehingga dalam hal ini, karakteristik utama multikulturalisme dalam praksis pendidikan yaitu; (1) belajar hidup dalam perbedaan, (2) membangun saling percaya (*mutual Trust*), (3) memelihara saling pengertian (*mutual Understanding*) (4) menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), (5) terbuka dalam berfikir, (6) apresiasi dan interdependensi, dan (7) resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan.³⁵

E. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat kita tarik sebuah benang merah bahwa akar dari filsafat multikulturalisme adalah teori keadilan John Rawls dan teori kebebasan Charles Taylor sehingga dalam multikulturalisme nilai keadilan dan kebebasan menjadi dominan. Pendidikan multikultural bukan hanya sebuah trending topik atau budaya latak para pakar pendidikan. Lebih dari itu, pendidikan multikultural merupakan upaya para pakar pendidikan menformulasikan pendidikan yang dapat dinikmati berbagai kalangan dan tentunya menjadi solusi permasalahan pendidikan yang lazim biasa didengar seperti diskriminasi, konflik budaya dan ras serta golongan. Sehingga dalam pengembangannya, pendidikan multikultural haruslah memakai filsafat multikulturalisme dalam dasar pengembangannya.

Dan juga bila pendidikan multikultural coba kita terapkan dalam konteks ke-Indonesia-an, maka akan kita dapati sebuah tawaran dari penulis dengan istilah kurikulum 2013 berbasis multikultural sebagaimana pembahasan bagian terakhir. Dan hemat penulis, penerapan multikulturalisme dalam pendidikan sehingga menjadi “pendidikan multikultural” sangatlah tepat mengingat Indonesia adalah negara multikultur terbesar di dunia. Terlepas dari pro kontra pendidikan multikultural, sebelum menerapkan konsep pendidikan multikultural, tentunya terlebih dahulu kita formulasikan kurikulum yang berbasis multikultural dengan filsafat multikulturalisme sebagai roh kurikulum tersebut.

³⁵ Zakiyuddin Baidlowy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikulturalisme*, Jakarta: Erlangga, 2005, Hlm. 75-84.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Pesantren, Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Islam Modern Assalam Surakarta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Dikjen Dikdasmen Depdiknas RI, *Pendekatan Kontektual, Kontektual Teaching and Learning (CTL)*, Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2003
- Djunaidi Ghoni, *Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural dalam Kajian yang tidak dipublikasikan*
- HAR Tilaar, *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004
- John. A Zahorik, *Constructivist Teaching*, Bloomington Indianan: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1995
- Kokom Komalasari, *Pembelajaran Kontekstual, Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Refika Aditama, 2013. Lorschbach dan K. Tolbin, *Constructivism as a Referent for Science Teaching*, *NARS Research Matters to the Science Teacher*. No. 30, 1992
- Made pidarta, *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: Riena Cipta, 2013
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Ridha Ahida, *Konsep Keadilan pada Masyarakat Multikultural dilihat dari Perspektif John Rawls dan Will Kymlicka*, dalam Perpustakaan Digital Universitas Indonesia,
- Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional dan Penjelasannya*, Yogyakarta: Media Wacana, 2003
- Yusuf Akhyar. *Multikulturalisme dalam Perspektif Filsafat*. Kajian dalam seminar "Student Circle" Pusat Studi Islam Paramadina dan Islamic College for Advance Studies (ICAS) Jakarta, 12 Maret 200
- Zakiyuddin Baidlowy, *Pendidikan Agama Benvawasan Multikulturalisame*, Jakarta: Erlangga, 2005